

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dapat terwujud, jika di satu pihak ada fasilitas dan pelayanan publik yang memadai, dan dilain pihak ada warga dan masyarakat yang secara sadar turut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan Negara yang berdaulat. Setiap warga Negara mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, dan terutama mempunyai tanggung jawab social sebagai warga Negara.

Keberhasilan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh perempuan. Perempuan mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. Salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan usaha produktif rumah tangga.

Pada dasarnya wanita merupakan mitra sejajar pria harus lebih dapat berperan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ikut melestarikan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan iklim sosial budaya yang mendukung agar mereka dapat menciptakan dan memanfaatkan seluas-luasnya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan melalui peningkatan pengetahuan, keahlian dan

ketrampilan dengan tetap memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat kaum wanita

Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan. Oleh karena itu, sesuai amanat Pemendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

Untuk membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola suatu Tim, yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, lebih dikenal dengan singkatan T.P.PKK. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan wanita sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

Pada dasarnya peran serta perempuan dalam pembangunan melalui organisasi PKK diarahkan pada pembangunan keluarga sejahtera. Pemahaman

tentang pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan atau proses perubahan selain menciptakan kondisi yang mengarah pada perbaikan kualitas hidup, juga akan membawa akibat sampingan yang negatif didalam segi kehidupan masyarakat. Peranan Tim Penggerak PKK dalam mengimplementasikan (melaksanakan) pembangunan keluarga sejahtera sejalan dengan ide dasar tujuan dibentuknya organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), untuk menumbuhkan peran serta ibu-ibu untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Didalam pelaksanaannya untuk mengatasi efek sampingnya dapat dipergunakan landasan idiil dan konstitusional yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan sebagai landasan operasionalnya yaitu GBHN. Selain itu sikap dan tingkah laku juga sangat menentukan, hal ini ditentukan oleh nilai-nilai moral dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Dalam era globalisasi saat ini dimana persaingan merupakan faktor dominan, maka PKK dituntut untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap serta kemandirian pribadi, keluarga dan masyarakat. Demikian pula dalam kondisi saat ini, dimana masyarakat semakin kritis, maka bagi Tim Penggerak PKK dihadapkan pada paradigma baru sesuai kondisi saat ini agar muncul kreativitas bagi anggota PKK. Dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Tim penggerak PKK harus tanggap menghadapi perubahan yang mendasar, sehingga dapat menjadi landasan bagi Gerakan PKK untuk memasuki masa depannya dan tetap dapat memberikan darma bakti serta

sumbangsinya untuk masyarakat, bangsa dan negara yang sedang membangun.

Untuk mensukseskan pembangunan pada masa sekarang ini dibutuhkan mobilisasi dari seluruh potensi dalam masyarakat. Dan perempuan merupakan sebagian dari masyarakat dan penduduk Indonesia, dan juga merupakan potensi tenaga kerja tetapi belum sempat dimanfaatkan sepenuhnya didalam proses pembangunan terutama dipelosok-pelosok desa. Dengan kinerja Tim Penggerak PKK tersebut, harapannya adanya partisipasi aktif ibu-ibu anggota PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Selanjutnya dalam teknis kerjanya Tim Penggerak PKK dibantu oleh Kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dan kelompok Dasawisma. Wujud partisipasi dari ibu-ibu anggota PKK dalam melakukan aktivitas dengan menambah ketrampilan, pengetahuan dan usaha bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menjaga kerukunan antar tetangga. Namun demikian bagi ibu-ibu anggota PKK diperlukan pemahaman, keikutsertaannya dalam kegiatan PKK, disamping mendapatkan manfaat yang berguna dari kegiatan tersebut. Hingga akhirnya mampu untuk menyebarluaskan hasil yang diperoleh kepada masyarakat luas.

Pasal 27, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam konteks pembahasan ini bisa diartikan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan

program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintahan Desa. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan masih termarginalkan. Implikasinya, walaupun dari segi kuantitas jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, akan tetapi secara kualitas lebih kecil dari laki-laki.

Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan kesetaraan gender dengan menjadikan gender sebagai arus utama dalam pembangunan, dan ditegaskan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintah dan non Departemen di Pemerintah Nasional, Propinsi maupun di Kabupaten/Kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan.

Dalam hal ini dibutuhkan kesatuan gerak dari seluruh potensi perempuan itu sendiri yang berfungsi sebagai pendorong kemajuan perempuan. Maka salah satu dari kegiatan atau yang mewadahi kegiatan perempuan adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK. Maka dari itulah semua program dan kegiatan perempuan

harus dilakukan secara konseptual dan menyeluruh sehingga tidak terjadi campur aduk atau tumpang tindih dan berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan agar perempuan Indonesia berperan dalam segala bidang pembangunan. Sehubungan dengan itu, organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, dituntut untuk melakukan usaha berperan aktif melalui berbagai program dan kegiatan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Demak, partisipasi perempuan ini masih sangat kurang dilibatkan dalam pembangunan mulai dari tingkat Kabupaten, sampai ke tingkat desa. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor tradisi adat istiadat dan pemaknaan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang lebih mengarah pada patriarki (penekanan pada peran laki-laki), sehingga mengakibatkan kaum perempuan kurang dilibatkan dalam pembangunan. Kaum perempuan berpartisipasi dalam urusan rumah tanggasedangkan dalam hal isu-isu sosialkemasyarakatan menjadi persoalan kaum pria. Selain itu, juga karena faktor kebijakan pemerintah yang hanya memberikan sedikit presentase bagi keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Dari 100%, perempuan hanya diberikan porsi 30 persen. Di tingkat desa, masyarakat desa tentu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah faktor kebijakan pemerintah dalam hal

keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang hanya menyediakan sedikit kuota, faktor budaya dan tradisi yang dianut dan dihidupi oleh warga desa.

Fakta pemahaman budaya yang keliru, kebijakan pemerintah, dan tingkat pendidikan, ini menyebabkan sehingga berimbas pada kebijakan pemerintah desa di hampir seluruh Desa di Kecamatan Wedung. Hal ini menyebabkan perubahan pola pikir seperti ini sangat dibutuhkan dengan mengembangkan kosep pemikiran baru. Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul: “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan (Studi Kasus Peran Organisasi PKK dalam Pembangunan di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Peran Perempuan Melalui Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pembangunan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Melatih penulis dalam menerapkan metodologi penelitian.

- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan tentang peranan perempuan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kemampuan menganalisis suatu peristiwa
- d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian di kemudian hari.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran perempuan dalam pembangunan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang melatar belakangi peran perempuan dalam pembangunan.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partisipasi Perempuan

a. Partisipasi

Istilah “Partisipasi” menurut Kamus Besar Indonesia adalah “Hal untuk berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.” Menurut Siagian Partisipasi adalah Keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan-tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.¹

¹Siagian, SP. (1983). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung

Dari definisi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagin, partisipasi mengandung makna yaitu keterlibatan seseorang dalam berpartisipasi tidak hanya secara fisik tetapi ada dalam wujud sumbangan pikiran, ide-ide dan ikatan emosi sebagai manusia dalam rangka mencapai tujuan yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab.

Sedangkan Mubyarto memberikan pengertian Partisipasi Sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.²

Dari pengertian tersebut, keikutsertaan dalam suatu kegiatan seseorang secara sukarela tanpa harus mengorbankan kepentingan sendiri.

Berbeda dengan Siagian dan Mubyarto, Moeljarto mengemukakan bahwa partisipasi adalah penyertaan mental serta emosi seseorang dalam situasi yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut³.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan partisipasi sebagai keterlibatan individu sebagai warga masyarakat baik secara fisik maupun secara psikologis (emosi) untuk memberikan tenaga, materi dan pikiran dalam setiap kegiatan atau usaha guna

²Mubyarto.1984. Strategi Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: P3PK UGM

³Moeljarto Tjokrowinoto,. 1987. Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Tiara Wacana, Yogyakarta

mencapai tujuan bersama dengan penuh tanggungjawab tanpa harus mengorbankan kepentingan diri sendiri.

b. Peranan Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perempuan berarti orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.⁴Sedangkan menurut Dendy Sugono Wanita adalah perempuan dewasa.⁵Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita dewasa dengan ciri-ciri mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, menyusui dan melahirkan anak.Pada penelitian ini perempuan yang dimaksudkan adalah perempuan yang berperan dalam organisasi PKK di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Peranan perempuan adalah peranan dalam kaitannya dengan status atau kedudukan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat serta dalam pembangunan nasional, yang dalam hal ini telah berperan aktif sehingga dapat memberikan efek ganda akan kedudukan perempuan dalam rumah tangga, masyarakat dan pembangunan nasional.

Dengan demikian akan lebih jelas bahwa antara status dan peranan saling berkait. Adalah sulit dibicarakan adanya peranan tanpa adanya status dan sebaliknya status tanpa peranan.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://www.kamusbahasaindonesia.org>

⁵ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1616.

Hal ini ditegaskan oleh Dr. Phil. S. Susanto sebagai berikut : Role atau peranan adalah dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun juga bisa disebut status subyektif. Peranan dan status kait mengkait yaitu karena status adalah kedudukan yang memberikan hak dan kewajiban sedang kedua unsur ini tidak akan ada artinya kalau tidak dipergunakan.⁶

Sebagaimana penulis telah kemukakan bahwa perempuan adalah merupakan sumber daya manusia dan oleh karena itu juga merupakan potensi bagi upaya untuk mempercepat laju pembangunan. Dengan adanya partisipasi kaum perempuan, akan menjamin berhasilnya pembangunan.

Bukankah ikut sertanya perempuan pada umumnya dalam pembangunan berarti pula memanfaatkan suatu sumber manusiawi dengan potensi yang tinggi⁷.

Dan kalau kita lihat dari sudut tanggungjawab, maka pembangunan itu bersifat nasional karena watak kerakyatan dari pembangunan Indonesia justru meminta tanggungjawab semua pihak, semua golongan, semua lapisan dan semua generasi, yang berarti pula bahwa kaum perempuanpun harus terlibat dalam memikul tanggungjawab pembangunan nasional tadi.dengan demikian

⁶Astrid Phil. S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bina Cipta, 1979), hal. 94.

⁷Pudjiwati Sajogyo, *Peranan wanita dalam dalam perkembangan Masyarakat Desa*, (Jakarta : C.V Rajawali, 1983), hal. 1.

perempuan tidak hanya mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Mengerti masalah perempuan akan membantu kita pula untuk mengisi arti dari pada “pembangunan”, yaitu, jika pembangunan dirumuskan sebagai suatu proses diman insane-insan pria dan wanita yang menjadi sasaran pembangunan seyogyanya berpartisipasi “sama nilai” (*equally*) dalam proses tersebut⁸.

Supaya peranan perempuan tersebut terarah dan kuat maka segala kegiatannya perlu diorganisir dengan baik, ditampung didalam suatu wadah yaitu organisasi PKK.

Terkait dengan peran ganda perempuan di era pembangunan, selama ini di Indonesia, gerakan untuk memperjuangkan kedudukan dan peranan perempuan telah cukup lama dilakukan. Pengertian peran ganda perempuan di era pembangunan adalah partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik, dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan.

Pada masyarakat pedesaan peran ganda perempuan bukanlah hal yang baru. Mereka disamping sebagai istri, ibu juga harus bekerja di luar rumah, misalnya: bertani, berkebun, berdagang, mencari kayu, bekerja sebagai buruh dan lain-lain. karena tanpa bekerja kebutuhsn hidup tidak akan terpenuhi. Berarti bekerja merupakan suatu keharusan. Pada umumnya perempuan yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi

⁸Pudjiwati Sajogyo, *Op.Cit.*, hal. 2-3.

merupakan sumber daya bagi pembangunan, sehingga bila tidak dimanfaatkan merupakan suatu penghamburan dana. Karena mahalny biaya pendidikan.

Pergeseran dalam peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi ketika seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan Negara. Di mana peran perempuan tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Hal itu harus diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan yang positif dan pasti.

Pembagian peran domestik dan publik tidak relevan jika diterapkan dalam masyarakat Jawa. Karena dalam masyarakat ini perempuan terbiasa dengan peran domestik sekaligus publik. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat Jawa golongan petani, pedagang, dan nelayan, di mana perempuan mengurus rumah tangga (domestik) sekaligus mencari nafkah (ekonomi-publik).

Isu tentang *Gender* menjadi bahan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam pembicaraan pembangunan dan perubahan

2. Pembangunan Desa

Penertian tentang pembangunan dijelaskan oleh beberapa ahli menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan diartikan sebagai suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan

tertentu yang dianggap lebih baik⁹. Sedangkan menurut S.P. Siagian, pembangunan diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (*national building*).¹⁰

Memperhatikan dua batasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ialah suatu proses pembaharuan yang dilaksanakan secara sadar, berencana, kontinue dan terus menerus dalam rangka pertumbuhan dan perubahan menuju modernisasi guna mewujudkan keluarga sejahtera dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat menentukan karena masyarakat harus dipandang sebagai subyek dan obyek dari pembangunan. Sebagai subyek, masyarakat merupakan faktor motivator yang memberikan inisiatif dan kreatif untuk berperan serta dalam pembangunan. Sedangkan sebagai obyek, masyarakat merupakan sasaran dari pembanguna baik pembangunan secara fisik maupun mental spiritual. Dengan menyadari sebagai subyek dan obyek pembangunan maka dengan sendiri akan timbul keinginan untuk melakukan dan menunjang pelaksanaan pembangunan, karena disadari bahwa pembangunan tersebut pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan kondisi yang demikian maka masyarakat

⁹Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1978), hal. 222.

¹⁰Sondang P. Siagian MPA., *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 2004), hal. 2-3).

akan mendorong atau mendukung kebijakan dan langkah-langkah pemerintah dalam pembangunan.

Pembangunan yang dimaksud diatas, tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik saja, tetapi juga menyangkut pembangunan non fisik yaitu segi manusianya, mental spiritual dan ekonomi. Pembangunan yang mendasarkan pada konsep manusia bertujuan agar mampu dan mandiri dalam menolong dirinya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mubyarto, mengemukakan bahwa “ada 5 (lima) unsur pembangunan manusia yang kait mengkait antara satu dengan yang lainnya yaitu :

- 1) Kualitas kehidupan fisik
- 2) Mata pencaharian
- 3) Individualitas dan kebebasan memilih
- 4) Pengembangan diri, dan
- 5) Pemekaran kehidupan sosial politik.

Telah diuraikan secara umum pola pembangunan menempatkan desa sebagai basis pembangunan, oleh karena itu desa harus dibangun untuk terwujudnya pemerataan pembangunan bagi tercapainya kesejahteraan.

Adapun mengenai *pembangunan desa*, pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Definisi pembangunan

desa menurut para ahli; Menurut Kartasmita (2001 : 66)¹¹ mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222)¹² mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini :

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih

¹¹*Kartasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.

¹²Ahmadi, A, Uhbiyati, N. (2001). *Ilmu pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis.

Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitiandan pendidikan yang sangat baik.

- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujuka pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
- d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa

Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- e. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama.

3. Gender Desa

Adapun *pengertian gender* adalah sifat dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Rahayu et al, 2006). Gender lebih menunjuk kepada relasi dimana laki-laki dan perempuan berinteraksi (Nasikun dalam Abdullah, 2001). Dengan cara ini fokus kajian tidak hanya tertuju pada perempuan tetapi juga kepada laki-laki yang secara langsung berpengaruh di dalam

pembentukan realitas hidup perempuan (Abdullah, 2001)¹³. Merujuk pada kehidupan pedesaan, dimana akses informasi dan sumber dayanya yang masih terbatas, sulit bagi masyarakat pedesaan untuk bisa lebih memahami makna gender yang sebenarnya. Peran perempuan dalam masyarakat pedesaan yang masih belum maksimal, masih mengacu pada aspek biologis atau jenis kelamin. Atau bisa dikatakan masih terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sering mengakibatkan ketidakadilan salah satu pihak. Bisa diartikan bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan masih berpandangan pada bias gender. Dimana bias gender merupakan suatu pemikiran yang masih mempersoalkan bahwa peran dan fungsi perempuan hanya berada di ranah domestik sementara peran dan fungsi laki-laki ada di ranah publik. Atau bisa dikatakan ciri paling dominan dari perempuan adalah keterikatan mereka dengan rumah dan keluarga atau dengan lokalitas tertentu karena perempuanlah yang bertanggung jawab dalam bidang domestik (Abdullah, 2001).

Bahkan beberapa waktu terakhir ini banyak media yang membahas tentang protes dan gugatan yang terkait dengan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, ketidakadilan dan diskriminasi tersebut terjadi hampir di semua bidang, mulai dari tingkat nasional negara, agama, sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai tingkat rumah tangga. Pengertian gender menurut para ahli, antara lain :

¹³Abdullah, Irwan. 2001. Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta :

- Gender adalah peran sosial dimana peran laki-laki dan peran perempuan ditentukan (Suprijadi dan Siskel, 2004).
- Gender adalah perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode waktu tertentu (WHO, 2001).
- Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya (Azwar, 2001).
- Gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (Suryadi dan Idris, 2004).¹⁴

Selanjutnya terkait *Gender Desa* dikatakan bahwa "Kesadaran gender yang belum dimiliki oleh masyarakat pedesaan berdampak pada pandangan orang tua terhadap laki-laki dan perempuan yang masih kuat mencerminkan *male dominant*, yang berarti betapapun tingginya kemampuan anak perempuan prioritas pendidikan akan tetap diberikan kepada anak laki-laki (Al Hibri et al, 2001). Hal inilah yang menimbulkan

¹⁴http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45470-Makalah-Gender%20Dan%20Kajian%20Tentang%20Perempuan.html

kesenjangan dalam memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Namun demikian apabila hal tersebut tidak mengalami perubahan akan muncul dampak pada *Gender Desa*. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan adalah :

1. Terhadap kehidupan perempuan sendiri :

- Perempuan menjadi kurang percaya diri karena kemampuannya yang masih terbatas.
- Perempuan masih terpaku pada stereotipi penjaga ranah domestik (rumah tangga).
- Perempuan kurang mempunyai ketrampilan khusus sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, terlebih pekerjaan di sektor formal.

2. Terhadap kehidupan keluarga : Faktor pernikahan usia muda, mengakibatkan perempuan yang tidak didasarkan pada pendidikan dapat memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Karena perempuan yang menjalani pernikahan usia muda, belum siap mental sehingga rawan terjadi perceraian dan sebagainya.

3. Terhadap kehidupan di masyarakat : Kurangnya keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat seperti organisasi-organisasi di pedesaan. Sehingga pengambilan keputusan sering dipusatkan pada keputusan laki-laki tanpa adanya pendapat perempuan terlebih dahulu.

Namun demikian dalam pembagian kerja berdasarkan Gender Desa dalam perspektif masyarakat Desa Tempel terwujud dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam masyarakat Desa Tempel kesetaraan gender terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana memang tidak ada perbedaan yang signifikan antara suami-istri-anak perempuan-anak laki-laki dalam lingkungan keluarga. Seluruh anggota keluarga memiliki kewajiban yang sama dalam mencari nafkah, walaupun memang suami tetap yang paling utama namun istri dan anak-anaknya ikut serta membantu menggarap ladang. Dalam aspek keluarga lainnya adalah dalam proses pengambilan keputusan baik dalam hal kecil maupun besar dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga, tidak terkecuali anak-anak mereka.

Dalam pengaturan ekonomi keluarga, antara suami dan istri saling bahu-membahu mengatur perekonomian. Walaupun sama-sama bekerja, namun istrilah yang mengatur keseluruhan keuangan keluarga. Dan jika membutuhkan uang untuk keperluan membeli pupuk untuk ladang mereka, maka suami meminta istri untuk membelikannya dengan uang yang disimpan oleh istri.

Pada dasarnya, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan dominan jika dibandingkan dengan perempuan. Buktinya dari lingkup yang kecil saja seperti keluarga, kedudukan tertinggi dalam keluarga adalah kepala keluarga. Kepala keluarga pada masyarakat Desa Tempel dipegang oleh laki-laki. Otomatis pengambilan keputusan terakhir itu ditentukan dan

bergantung pada laki-laki. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan, akan tetapi laki-laki yang memiliki hak dan wewenang lebih, akan menentukan apa yang seharusnya dilakukan keluarga. Perempuan dalam pengambilan keputusan itu hanya membantu memberikan pertimbangan saja, selebihnya keputusan ada di tangan laki-laki sebagai kepala keluarga.

Persepsi masyarakat desa yang masih menganggap peranan perempuan di dalam rumah tangga tidak memberikan motivasi dan minat bagi kaum perempuan di pedesaan untuk memperoleh pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu keterbatasan ekonomi keluarga yang mengharuskan perempuan untuk meninggalkan bangku sekolah dan mengutamakan laki-laki di dalam keluarganya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi karena harapan tanggung jawab keluarga. Masalah bias gender ini berdampak negatif bagi perempuan baik dalam kehidupan perempuan itu sendiri, kehidupan keluarganya dan kehidupan di masyarakat.

Kondisi di di Desa Tempel, bahwa perempuan masih dianggap berada di bawah laki-laki sehingga jika rapat dilaksanakan secara bersamaan antar keduanya, maka dikhawatirkan perempuan tidak dapat menyampaikan pendapat karena dikalahkan oleh suara laki-laki dan adanya perasaan segan terhadap pihak laki-laki. Dalam pelaksanaan rapat tersebut perempuan masih diberikan ruang untuk berpendapat. Hanya saja,

dapat dilihat bahwa masih adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan kedudukannya masih di bawah laki-laki.

4. Organisasi PKK

1) Sejarah Singkat PKK¹⁵

PKK sebagai sebuah organisasi bermula dari seminar *Home Ekonomi* di Bogor pada tahun 1957. Seminar tersebut menghasilkan rumusan 10 (sepuluh) segi kehidupan keluarga yang kemudian ditetapkan sebagai kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan sekolah-sekolah dan pendidikan masyarakat. Pada tahun 1961 ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang menetapkan sepuluh segi kehidupan keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan disekolah-sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan Keluarga.

Bersama dengan itu, melihat penderitaan yang dihadapi keluarga-keluarga di Jawa Tengah saat itu, terutama dipedesaan, khususnya Daerah Dieng Kabupaten Wonosobo banyak warga yang menderita Honger Odeem (HO) / busung lapar Ibu Isriati Moenadi sebagai isteri Gubernur Jawa Tengah, merintis terbentuknya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan masyarakat yang bertujuan “mewujudkan kesejahteraan keluarga, atas kesadaran dan kemampuan keluarga itu sendiri”.

¹⁵Disarikan dari <http://bapermades.jatengprov.go.id/main/page/pkk/16>, diakses tanggal 2 Mei 2016, pukul 10.25 WIB.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PKK melaksanakan “Sepuluh Program Pokok PKK”. Pada tahun 1967 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, sebagai gerakan mulai dibentuk diseluruh Jawa Tengah. Keberadaan PKK ditengah-tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya.

Apa yang telah dirintis Ibu Isriati Moenadi, dilanjutkan kemudian oleh Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, sebagai ketua PKK Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya tahun 1983 menjadi Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Saat itu kegiatan PKK ditingkatkan dan dikembangkan melalui upaya membangkitkan dan menggerakkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang akhirnya menarik perhatian berbagai kalangan, sehingga PKK banyak dikunjungi tamu-tamu baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada tahun 1972, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, agar gerakan PKK dilaksanakan dan ditingkatkan diseluruh wilayah Indonesia. Tim Penggerak PKK dibentuk disemua tingkat administrasi : Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, yang diketahui oleh isteri Pimpinan Daerah setempat. Melalui surat kawat Mendagri No. SUS.3/6/12, tanggal 27 Desember 1972.

Kemudian pada sidang MPR pada Tahun 1983 PKK ditetapkan dalam GBHN / TAP MPR No.II Tahun 1983 sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan. Pada tahun

1988 PKK banyak menerima penghargaan dari berbagai Instansi dan Lembaga Internasional antara lain :*MauricePate Award* dari PBB pada tanggal 18 April 1988 dan *Sasakawa Health Prize* dari WHO pada tanggal 18 Mei 1988.

Begitu juga pada tahun 1993 semakin banyak penghargaan yang diterima oleh PKK. Antara lain dari luar negeri yaitu :*“Asian Management award”* dari Asian Institut Management pada tanggal 5 September 1993. Pada tahun 1995, atas kemampuannya mengelola masyarakat PKK memperoleh penghargaan *“Noma Literacy Prize”* dari Unesco / PBB Beijing pada tanggal 8 September 1995 atas jasa PKK dalam pemberantasan Buta Aksara di Indonesia, disamping itu juga diterima penghargaan *“Kesatria Bhakti Husada Aditya”* kelas I dari Depkes RI pada tanggal 11 September 1995 atas jasa PKK dalam pelaksanaan PIN (Pekan Imunisasi Nasional) pada tahun 1995 / 1996. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional tanggal 2 Juli 1997 Tim Penggerak PKK menerima anugerah *“Satya Lencana Wirakarya”* dari Presiden RI atas upaya dan jasa pengabdian dalam mensukseskan operasional gerakan Keluarga Berencana dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Pada bulan Desember 1997 Tim Penggerak PKK Pusat menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang diikuti oleh kader-kader PKK dari 27 Provinsi. Dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S.M selaku Pembina PKK memberikan

penghargaan kepada Pelindung, Penasehat, Kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15 tahun dan 10 tahun tanpa terhenti. Penghargaan yang diberikan antara lain : Medali Tertinggi disebut PARAMAHITA NUGRAHA, Medali Utama tersebut ADHI BHAKTI UTAMA dan Medali Madya disebut ADHI BHAKTI MADYA.

Pada perkembangan selanjutnya sesuai dengan Era Reformasi dan GBHN 1999 adanya paradigma baru pembangunan serta Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan rapat Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 02 Nopember 2000 di Bandung, yang menghasilkan pokok-pokok kesepakatan antara lain : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK.

2) Atribut PKK¹⁶

1) Lambang PKK

Lambang PKK adalah lambang sebagaimana yang ditentukan dalam Rakernas VI PKK Tahun 2005 yunto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1983.

¹⁶Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010, diterbitkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat.



- Bentuk: Akolade melingkar segi lima memiliki arti Pancasila sebagai asas Gerakan PKK. Bentuk ini terdiri dari gambar-gambar:

- 1) Bintang
- 2) 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi
- 3) Akolade melingkar
- 4) Rangkaian mata rantai
- 5) Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, berwarna hitam
- 6) 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga.

- Warna¹⁷ : warna lambang terdiri dari :

- 1) Warna dasar lambang adalah biru benhur.
- 2) Warna kuning yang dimaksud adalah warna kuning emas, untuk :

¹⁷Khusus yang dicetak diatas logam warna kuning adalah kuning kunyit dan akolade segilima adalah warna dasar logam.

- a) Gambar bintang
- b) Gambar padi
- c) Gambar rantai
- d) Gambar kelopak bunga kapas
- e) Gambar tangkai padi dan tangkai kapas
- f) Gambar akolade segi lima.

3) Warna putih yang dimaksud adalah :

a) Putih perak untuk :

- (1) Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam.
- (2) Gambar akolade melingkar.
- (3) Gambar bunga kapas.
- (4) Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas.

b) Putih kapas untuk :

- (1) Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Bunga kapas khusus yang dicetak pada logam.

▪ Arti

1) Warna :

- a) Biru melambangkan suasana damai, aman, tenang dan sejahtera.
- b) Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad

c) Kuning melambangkan keagungan cita – cita.

d) Hitam melambangkan kekekalan / keabadian.

▪ **Komponen**

a) Segilima, melambangkan Pancasila sebagai dasar / asas Gerakan PKK.

b) Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c) 17 butir kapas 8 buah simpul pengikat 45 butir padi, melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran.

d) Alokade melingkar, melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e) Rangkaian Mata Rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga – keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan PKK.

f) Lingkaran Putih, melambangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

g) 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan

dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sarasanya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

2) Arti Keseluruhan :

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tentram, makmur dan sejahtera dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Kelembagaan dan Pengelola Gerakan PKK.¹⁸

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk di semua tingkatan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.

Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK Pusat dengan Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis. Untuk mendekatkan jangkauan pembinaan kepada keluarga-keluarga dibentuk

¹⁸Lampiran I-1 (Bagan Mekanisme Gerakan PKK), Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010, diterbitkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat.

kelompok-kelompok PKK Dusun / Lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma.

4) Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK¹⁹

Susunan keanggotaan Tim Penggerak(TP) PKK harus memperhatikan azas fungsi dayaguna dan hasilguna, ramping struktur kerja.

1. Pusat

a. Pelindung Utama PKK, Pelindung PKK, Ketua Dewan Penyantun TP PKK dan Penasehat TP PK.

b. Susunan keanggotaan TP PKK :

1) Ketua umum

2) Para ketua

3) Sekretaris umum dan para sekretaris

4) Bendahara dan bendahara I, II, (sesuai kebutuhan)

5) Kelompok Kerja (POKJA) sebanyak 4 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas :Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota.

c. Pimpinan harian terdiri atas :Ketua umum, Para ketua, Sekretaris umum, Bendahara dan Ketua Pokja I, II, III, IV.

d. Sekretariat terdiri atas :

1) Sekretaris umum.

¹⁹Lampiran I-3 (Bagan struktur TP PKK Pusat), Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010, diterbitkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat.

- 2) Para sekretaris, bertanggungjawab tugas-tugas:Ketatausahaan, Pengorganisasian, Perencanaan, Binda dan SPEM, Humas dan kerjasama antar lembaga serta Urusan rumah tangga.
 - 3) Tata usaha kantor.
- e. Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pelaksana kegiatan terdiri atas :
- 1) POKJA I sebagai pelaksana kegiatan program Penghayatan dan pengamalan pancasila serta Gotong royong.
 - 2) POKJA II sebagai pelaksana kegiatan program Pendidikan dan ketrampilan; dan Pengembangan kehidupan berkooperasi.
 - 3) POKJA III sebagai pelaksana kegiatan program Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - 4) POKJA IV sebagai pelaksana kegiatan program Kesehatan, Kelestarian lingkungan hidup, Perencanaan sehat.
 - 5) Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah pokja baru, berada dalam lingkup sekretaris umum/pokja-pokja yang bersangkutan.

2. Daerah²⁰

Susunan keanggotaan TP PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan masing-masing terdiri atas :

a. Susunan keanggotaan TP PKK²¹

- 1) Ketua dewan penyantun TP PKK.

²⁰Lampiran I-4 (Bagan struktur TP PKK Daerah), Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010, diterbitkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat.

²¹Apabila diperlukan Penasehat PKK dapat diadakan di provinsi dan kabupaten/kota.

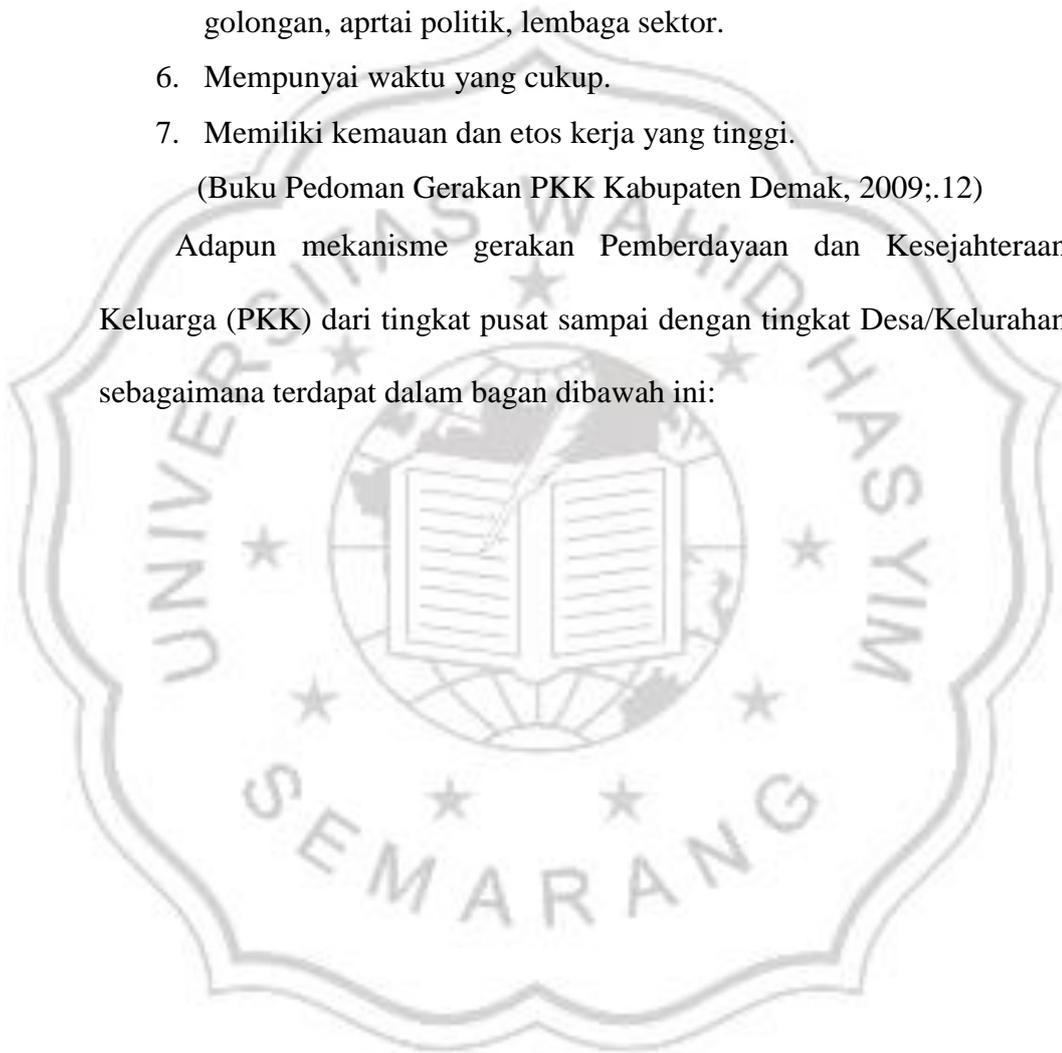
- 2) Ketua.
 - 3) Para wakil ketua.
 - 4) Sekretaris dan para wakil sekretaris.
 - 5) Bendahara dan para wakil bendahara.
 - 6) Kelompok kerja (POKJA) I, II, III, IV.
 - 7) Kegiatan-kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut Kelompok Khusus (Poksus) tanpa menambah pokja baru, berada dalam lingkup sekretaris umum/pokja-pokja yang bersangkutan.
- b. Sekretariat terdiri atas :
- 1) Sekretaris.
 - 2) Para wakil sekretaris, bertanggungjawab atas tugas-tugas Ketatausahaan; Pengorganisasian;Perencanaan;Binda dan SPEM;Humas dan kerjasama antar lembaga; Urusan rumah tangga.
 - 3) Tata usaha kantor.
- c. Kelompok kerja sebagai pelaksana program, sama dengan dipusat
- d. Susunan TP PKK Desa/Kelurahan, disesuaikan dengan keanggotaan TP PKK di atasnya dengan memperhatikan pembagian tugas sekretaris dan wakil sekretaris, disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Adapun kriteria yang harus dimiliki sebagai anggota Tim Penggerak PKK dapat diketajui sebagai berikut :

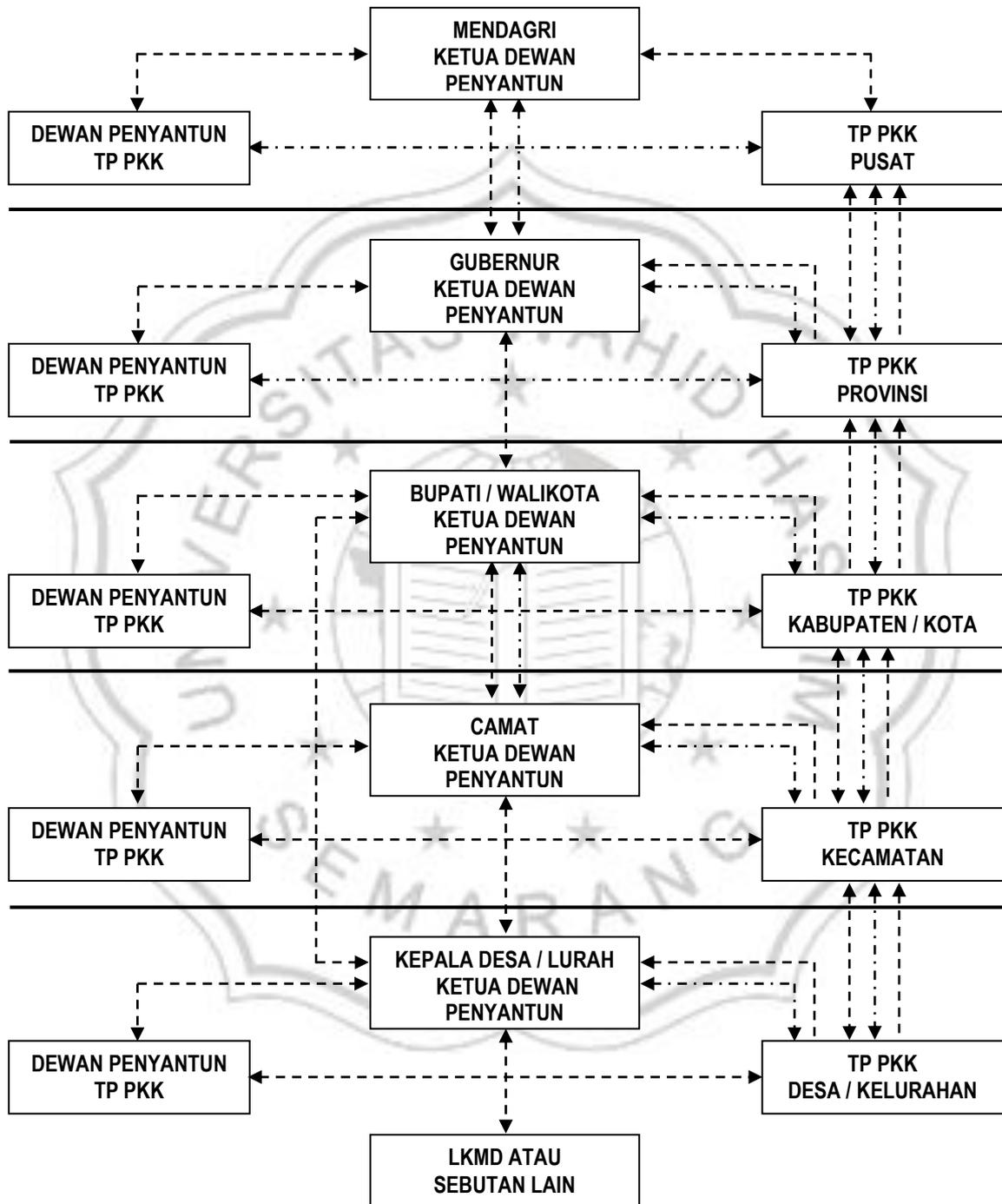
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
2. Dapat membaca dan menulis.
3. Relawan.
4. Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
5. Bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga sektor.
6. Mempunyai waktu yang cukup.
7. Memiliki kemauan dan etos kerja yang tinggi.

(Buku Pedoman Gerakan PKK Kabupaten Demak, 2009;.12)

Adapun mekanisme gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana terdapat dalam bagan dibawah ini:



Bagan 1.1

Mekanisme Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)²²

²²Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010, (Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat, 2010), hal. I-48.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.²³ Dari segi data yang akan penulis laporkan penelitian ini dikategorikan dengan penelitian deskriptif atau mendeskripsikan subjek yang akan di teliti.

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.²⁴ Penelitian ini memberikan gambaran atau uraian tentang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (Studi Kasus Peran Organisasi PKK dalam Pembangunan di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Lokasi penelitian dipilih dengan alasan bahwa Desa Tempel Merupakan salah satu desa berprestasi di Kecamatan Wedung dalam setiap kegiatan perlombaan desa.

²³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 6.

²⁴ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2009), hal. 108.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Ibu-ibu PKK Desa Tempel Kecamatan Wedung. Ibu-ibu PKK dijadikan subjek dalam penelitian ini dengan alasan bahwa ibu-ibu PKK memiliki peranan dalam kegiatan pembangunan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke obyek penelitian. Untuk memperoleh data-data lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁵ Sedangkan menurut Winarno observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subyek maupun obyek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan.²⁶

Metode ini penulis gunakan dengan cara bertemu langsung dengan ibu-ibu PKK yang menjadi fokus penelitian. Bertemu dengan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal. 136.

²⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 31.

Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan mengamati kondisi Desa, sarana prasarana Desa, jenis kegiatan PKK.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.²⁷ Maksud penggunaan metode ini adalah untuk mencari data yang berhubungan dengan peran ibu-ibu PKK dengan cara melakukan tanya jawab bersamaan dengan langkah observasi. Wawancara ini penulis lakukan dengan bertanya langsung tentang peranan apa saja yang telah dilakukan ibu-ibu PKK dalam pembangunan di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang data profil desa, sarana dan prasarana, penunjang kegiatan lomba, dokumen yang berkaitan dengan rencana, proses dan hasil perlombaan desa.

²⁷ Ronny Kountur, *Metode...*, hal. 186.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 158.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Setelah data dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi terkumpul selanjutnya diadakan triangulasi yakni pengecekan keabsahan data²⁹ dengan membandingkan dan mengecek kesesuaian antara data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Langkah kedua ini dengan cara indentifikasi data satuan untuk dikaitkan dengan masalah penelitian kemudian membuat kode setiap satuan data tersebut agar tetap dapat ditelusuri.³⁰ Data-data penelitian yang berbentuk satuan data yang telah dicek keabsahannya selanjutnya dibuat kode agar data tersebut dapat dikaitkan dengan mudah bersama data yang lain.

3. Kategorisasi

Proses kategorisasi adalah proses menyusun kembali catatan dari hasil observasi atau wawancara menjadi bentuk yang lebih sistematis.³¹

Setelah data yang sama diberikan kode kemudian dibuat kategori

²⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2008), hal. 330.

³⁰Lexy J Moleong, *Metodologi...*, hal. 288.

³¹ Rony Kountur, *Metode...*,hal. 192.

dengan memilah-milah data yang sesuai dengan penelitian dan setiap kategori diberi nama yang disebut label.³²

4. Sintesisasi

Langkah selanjutnya yaitu sintesisasi yakni mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lain dan diberi nama lagi³³ untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka dasar teori dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Organisasi PKK di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Bab III Analisis Hasil Penelitian. Berisi tentang analisis peranan ibu-ibu PKK pada kegiatan pembangunan di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, faktor yang menjadi latar belakang peran ibu-ibu PKK, Pembahasan Hasil analisis Penelitian

Bab IV berisi Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

³² Rony Kountur, *Metode...*, hal. 288.

³³ Rony Kountur, *Metode...*, hal. 289.